



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYA BUDHI UDRAYANA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 496854

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.450.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 314.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER SPORT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 67.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 1.831.000.000**

III. HUTANG **Rp. 581.800.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.249.200.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVI NURAINI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 873683

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.325.000.000

III. HUTANG Rp. 26.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.299.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Ugik Romadi
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 186238

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 975.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/105 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 149.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
4. Tanah Seluas 465 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 464.000.000**

1. MOBIL, Toyota Rush TRD Sportivo Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, Honda Vario Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 53.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 95.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.587.000.000

III. HUTANG

Rp. 430.125.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.156.875.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI SAWITRI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 459282

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 366.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/110 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 366.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.332.309

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 523.832.309

III. HUTANG Rp. 240.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 283.832.309

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENI SUMADI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 217646

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 693.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/80 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 693.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.600.000

1. MOBIL, TOYOTA ZIENTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.600.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.962.584

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 940.912.584

III. HUTANG Rp. 160.334.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 780.578.584

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARASWATI AYU PURBARANI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 815340

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	46.750.000
1. MOBIL, HONDA CIVIC GENIO Tahun 1993, HASIL SENDIRI	Rp.	38.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	8.750.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.048.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	63.450.891
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	136.248.891
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	136.248.891

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIANA ROSITA
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 880266

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **350.000.000**

1. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **108.000.000**

1. MOTOR, HONDA ACH1M21B04 AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX 150 CC Tahun 2016, LAINNYA Rp.
4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G A/T MOBIL PENUMPANG Tahun
2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **14.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **49.000.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **521.000.000****III. HUTANG** **Rp.** **50.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **471.000.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANNAH PERMATA INDAH
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 736390

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.910.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	63.389.396
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	116.299.396

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 116.299.396

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.